

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk jumlah pengangguran. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkannya.

Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030, sebuah peluang besar untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi. Namun, fenomena pengangguran yang tinggi di kalangan masyarakat berpendidikan menjadi hambatan untuk memanfaatkan bonus demografi. Pengangguran di kalangan kaum terdidik, yang berpendidikan tinggi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, dapat menghambat tingkat produktivitas yang diharapkan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik dan konsekuensinya bagi Indonesia.

Pengangguran di Indonesia selalu menjadi masalah yang tersembunyi dalam perkembangan modern. masalah yang disebabkan oleh fakta bahwa lulusan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta pada perguruan tinggi hanya ingin menjadi pencari kerja bukan sebagai pencipta kerja. Selain itu, standarisasi dari lembaga pendidikan yang menginginkan peserta didiknya lulus dengan cepat namun di sisi lain kurangnya lapangan kerja padat karya yang mampu menyerap tenaganya. Menurut Dunette (1976) keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dalam melaksanakan beberapa tugas. Dengan lebih dari 200 juta orang yang tinggal di Indonesia, masalahnya semakin kompleks.

Pengangguran terpelajar di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak, terutama dengan terus bertambahnya jumlah lulusan dari perguruan tinggi setiap tahunnya. Berikut ini adalah beberapa hal penting mengenai pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Lulusan Universitas statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di antara lulusan universitas biasanya lebih tinggi daripada lulusan sekolah menengah. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan antara kemampuan yang dimiliki lulusan dan tuntutan pasar kerja. Tingkat Pengangguran Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional.

Kemampuan yang Tidak Relevan banyak sarjana tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan sektor industri. Kurikulum pendidikan sering kali tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan pasar. Kualitas pendidikan walaupun terdapat banyak universitas di Indonesia, variasi dalam

kualitas pendidikan dapat memengaruhi persiapan lulusan untuk memasuki pasar kerja.

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran Indonesia Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan (Jiwa)

Provinsi	Tingkat Pendidikan					
	2022		2023		2024	
	SMA	S1	SMA	S1	SMA	S1
Aceh	92088	18492	98699	29550	32855.5	22114.8
Sumatera Utara	144443	31384	285493	64144	269944	60211
Sumatera Barat	77902	30176	89765	39527	93917	36888
Riau	83791	24324	80422	22435	75665	24005
Jambi	43299	12235	42512	14842	43275	14689
Sumatera Selatan	121770	31410	126545	21165	107766	34481
Bengkulu	20487	5737	15322	9416	16729	9929
Lampung	100458	20609	118001	17083	114066	20298
Kep. Bangka Belitung	6952.5	5038.6	15676	6552	19861	4860
Kep. Riau	73790	5074	48099	5989	42806	9983
Dki Jakarta	244756	61404	210864	61869	214693	67155
Jawa Barat	1140611	166033	1065485	144781	1053673	165144
Jawa Tengah	402915	62111	516854	104758	528671	410663
Di Yogyakarta	46136	12096	44120	16549	44928	16852
Jawa Timur	501814	85123	614154	119964	517287	137406
Banten	276594	38465	260257	44977	247701	38991
Bali	1016352	496136	1228080	533621	1021882	484014
Nusa Tenggara Barat	39314	13743	43954	15582	41545	13530
Nusa Tenggara Timur	46843	23770	40407	31971	47280	24792
Kalimantan Barat	66354	10516	69032	18659	63981	20045
Kalimantan Tengah	24867	7531	25867	85312	32202	7881
Kalimantan Selatan	44897	10182	45634	11150	47427	10582
Kalimantan Timur	61232	10945	59517	15140	64719	17781
Kalimantan Utara	6764	1977	8380	2620	8613	3414
Sulawesi Utara	47585	11424	46888	19196	51837	16833
Sulawesi Tengah	26666	9639	25151	6565	25644	6185
Sulawesi Selatan	106998	30000	108080	45021	101028	58738
Sulawesi Tenggara	22139	12938	23366	9528	21986	14402
Gorontalo	9610	3479	11728	2186	12614	29803
Sulawesi Barat	7374	2368	7592	2590	10004	3164

Maluku	37667	14631	33748	14870	33204	12948
Maluku Utara	16068	4016	19449	5081	16742	5530
Papua Barat	15482	11966	18643	6379	6161	1648
Papua	32116	6570	33116	7570	17904	6364

Sumber: Statistik Indonesia 2025

Pada data diatas dipaparkan bahwa di tahun 2023 pengangguran terdidik berada pada jumlah tertinggi terutama pada Provinsi Bali sebesar 1761701 jiwa tahun 2023. Pendidikan tinggi jumlah penganggurannya berada ditingkat kedua yaitu Provinsi Jawa Barat 1306644 jiwa pada tahun 2022 namun pada tahun berikutnya menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Akan tetapi provinsi Kalimantan utara mendapati jumlah pengangguran terdidik paling rendah dengan jumlah 8741 jiwa pada tahun 2022 namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan jumlah pengangguran terdidik hal ini dapat disebabkan karena penambahan jumlah usia produktif.

Jumlah pengangguran terdidik yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukanlah cara utama untuk mengurangi risiko pengangguran di Indonesia. Kemungkinan besar, akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan bagi lulusan sekolah menengah atas, bahkan setingkat perguruan tinggi, yang memiliki keterampilan khusus dan siap mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk dunia kerja. Faktanya, sejumlah besar lulusan masih tidak memiliki pekerjaan di negara Indonesia.

Menurut Philip Coombs (1984), kualitas pendidikan dapat diukur berdasarkan seberapa baik sistem tersebut mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, termasuk di dalamnya penguasaan keterampilan dasar,

nilai moral, dan kesiapan mental untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Karena seseorang harus memiliki pendidikan sebagai modal dasar untuk mampu bekerja, karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan untuk bekerja.

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi pertumbuhan industri yang kurangnya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, karena tingkat pertumbuhan menunjukkan keadaan ekonomi di suatu wilayah. Ketika ekonomi membaik di suatu daerah, hal ini akan memberikan insentif bagi bisnis yang ada karena mereka memperluas kegiatan mereka dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Pengangguran terdidik adalah situasi di mana individu yang berpendidikan tinggi menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan, bukan karena tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka, tetapi karena individu-individu ini lebih diskriminatif ketika mencari pekerjaan.

Pengangguran terdidik hanya terjadi ketika seorang lulusan menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, ini dikenal sebagai pengangguran friksional. Lamanya masa tunggu juga bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan. Ada kecenderungan bahwa semakin lama peserta didik menunggu untuk memasuki pasar tenaga kerja, semakin lama pula waktu tunggu tersebut. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan kenaikan upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi adanya kesempatan kerja formal. Semakin tinggi kualitas individu (tenaga kerja), semakin banyak

kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umum, pekerjaan di perkotaan (pekerjaan kelas atas) atau posisi-posisi penting membutuhkan individu (tenaga kerja) yang berkualitas, terspesialisasi, dan sehat, yang mampu melakukan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Pengangguran masih menjadi tantangan utama di Indonesia, dimana sebagian besar daerah mengalami masalah pasar tenaga kerja yang serupa seperti pengangguran, terutama pengangguran terdidik.

Selain itu, kesenjangan dalam pembangunan yang seimbang juga merupakan masalah utama dalam meningkatkan bonus demografi. Pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu menyebabkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak merata, dimana banyak daerah yang tidak mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Hal ini dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran terdidik, terutama di daerah yang memiliki akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pengangguran terdidik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi daya serap tenaga kerja terdidik di Indonesia.

Ada faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan tinggi di suatu wilayah, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Bidang pendidikan dianggap memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produktif untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Gagasan implisitnya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kualitas hidup manusia. Dalam hal ekonomi nasional, semakin baik kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi pula standar hidup, pertumbuhan, dan kesejahteraan bangsa. Semakin berpendidikan angkatan kerja, semakin produktif angkatan kerja tersebut dan dengan demikian semakin banyak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Salah satu indikasi kualitas pendidikan di suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah telah tercapai. Rata-rata lama sekolah adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk menempuh pendidikan. Rata-rata lama sekolah juga dapat digunakan sebagai indikator dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pendidikan berakhir pada usia 25 tahun.

**Tabel 1.2 Data Rata Rata Lama Sekolah Di 3 Pulau Indonesia
(Tahun)**

Provinsi	2022	2023	2024
Provinsi Aceh	9.44	9.55	9.64
Provinsi Sumatra Utara	9.71	9.82	9.93
Provinsi Sumatra Barat	9.18	9.28	9.44
Provinsi Jakarta	11.31	11.45	11.49
Provinsi Jawa Barat	8.78	8.83	8.87
Provinsi Jawa Timur	8.03	8.11	8.28
Provinsi Papua Barat	7.84	7.93	7.86
Provinsi Papua	7.02	7.15	9.82

Sumber: Statistik Indonesia 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa rata-rata lama sekolah di Pulau Sumatra dari 3 tahun terakhir yang mana rata-ratanya sebesar 9 tahun dan hampir semua provinsi yang ada di Sumatra menjadi sample, sedangkan di pulau jawa hanya provinsi Jakarta saja yang menjadi tertinggi di pulau jawa dengan angka rata rata lama sekolah sebesar 11.49 tahun, dan pulau papua menjadi provinsi dengan angka rata-rata sekolah terendah pada tahun 2022 hanya dengan sebesar 7.02 tahun saja angka ini setara dengan smp sedrajat.

Meskipun angka tersebut meningkat setiap tahunnya, namun dapat diyakini bahwa angka yang ditunjukkan tersebut tetap menjadi kewajiban bagi ketiga negara tersebut untuk mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Selain itu, hal ini menjadi kendala besar bagi pemerintah pusat di masa depan yang mulai membina sumber daya manusia yang berprestasi untuk dapat bersaing di era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini.

Selain itu, investasi mempengaruhi tingkat pengangguran di antara kaum terdidik, karena diyakini bahwa dengan meningkatnya nilai investasi, nilai tambah bruto barang dan jasa di semua unit ekonomi di wilayah tersebut meningkat. Peningkatan kualitas barang dan jasa menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran turun. Menurut Sukirno (2004), investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam-penanam modal atau pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi atau menambah jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi pula peluang untuk menambah jumlah

tenaga kerja yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, yang berarti semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.

Investasi adalah cara menggunakan modal saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ketika investasi memaksimalkan manfaat bagi semua pihak, investasi dapat meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Investasi memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia, karena efek penggandaannya akan meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan, serta berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan kemakmuran jika semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat penuh dari kegiatan ini. Tujuan utama dari investasi adalah untuk merealisasikan tingkat keuntungan tertentu.

Namun, teori Harvard-Domar menyatakan bahwa investasi meningkatkan kapasitas produktif dan meningkatkan permintaan, yang mengindikasikan adanya hubungan antara investasi dan tingkat pengangguran. Dengan kata lain, semakin tinggi kapasitas produktif, semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja, dengan asumsi lapangan kerja penuh. Hal ini karena investasi meningkatkan faktor-faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Perekonomian secara keseluruhan memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, dan sebagai hasilnya, tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat.

Tabel 1.3 Data Investasi PMA Di 3 Pulau Indonesia
(Juta US\$.)

Provinsi	2022	2023	2024
Provinsi Sumatra Utara	580.40	1.316.10	1.181.30
Provinsi Sumatra Barat	95.60	120.70	115.90
Provinsi Riau	2.748.70	2.042.30	1.813.30
Provinsi Sumatra Selatan	1.226.30	1.478.60	2.283.30
Provinsi Jakarta	3.744.10	4.830.00	7.563.40
Provinsi Jawa Barat	6.534.50	8.283.70	9.972.30
Provinsi Jawa Tengah	2.362.00	1.563.70	2.358.00
Provinsi DIY	113.9	46	35.4
Provinsi Jawa Timur	3.134.00	4.741.00	3.661.10
Provinsi Banten	3.410.70	4.451.60	3.868.20
Provinsi Sulawesi Selatan	469	336.7	374.9
Provinsi Sultawesi Utara	877.9	448.3	369.1
Provinsi Gorontalo	102.9	33.8	34.9
Provinsi Sulawesi Barat	28.3	24.3	2.2

Sumber: Statistik Indonesia 2025

Investasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2024 terjadi di provinsi jawa barat mencapai nilai sebesar 9.972.30 juta US\$, dan Provinsi Jakarta juga mendapatkan aliran dana investasi penanaman modal asing yang cukup besar di tahun 2024 dengan besaran 7.563.40 US\$, sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan investasi penanaman modal asing paling rendah di pulau jawa. Lain halnya di pulau Sumatra provinsi riau investasi penanaman modal asing menjadi provinsi tertinggi dnan besaran 2.748.70 US\$ pada tahun 2022. Sedangkan provinsi dengan nilai investasi terendah ialah provinsi Sumatra barat yang hanya sebesar 95.60 US\$. Dan dari provinsi-provinsi Indonesia

hanya provinsi sulawsi barat yang hanya mendapatkan nilai terendah pada tahun 2024 dengan besaran 2.2 US\$.

Selain Angka rata lama sekolah, jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif juga menjadi puncak masalah pengangguran terbuka. Data tentang tingginya tingkat pengangguran di Indonesia pada penduduk berusia produktif yang berada dalam rentang usia 15 – 64 tahun, tercatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, yaitu sebesar 6,49%. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu situasi di mana populasi usia produktif melebihi jumlah populasi usia non-produktif antara tahun 2020 hingga 2030, yang mengakibatkan jumlah penduduk usia produktif meningkat sebesar 70% dari total populasi keseluruhan (Konoras et al., 2018). Situasi ini tentunya dapat menimbulkan isu serius yang perlu segera diselesaikan. Terlebih lagi, mengingat bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 yaitu mencapai 278,696 juta jiwa yang tercatat pada tahun 2023 (BPS, 2024).

Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengalami peningkatan usia produktif, yang dikenal sebagai bonus demografi, selama periode 2030-2040. Bonus demografi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan jumlah individu dalam kelompok usia produktif (antara 15 dan 64 tahun) dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif dalam masyarakat Indonesia selama periode tersebut. BPS memperkirakan bahwa setidaknya 64 persen dari kelompok usia produktif merupakan bagian dari total proyeksi penduduk Indonesia yang berjumlah 297 juta jiwa (BPS 2020). Sejauh ini, ada banyak negara yang telah mampu mengoptimalkan bonus demografi seperti Jepang, Korea Selatan, dan

Singapura. Salah satu keuntungan dari bonus demografi adalah kemampuannya untuk mentransformasi ekonomi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk usia kerja yang dua kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia anak-anak dan lansia. Jumlah penduduk usia kerja yang besar ini merupakan sumber daya tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang berkontribusi besar dalam mempercepat proses pembangunan. Secara global, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 merupakan yang terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Proporsi penduduk Tiongkok, India, dan Amerika Serikat terhadap total penduduk dunia masing-masing sebesar 18,46 persen, 17,70 persen, dan 4,25 persen, sedangkan penduduk Indonesia sebesar 3,47 persen. Kualitas penduduk berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, baik fisik maupun non-fisik (seperti kecerdasan, mental dan spiritual). Kualitas penduduk sangat penting untuk mempercepat pembangunan, karena pembangunan akan berjalan dengan baik jika pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan peningkatan produktivitas (Barthus, 1990).

Bonus demografi didefinisikan sebagai situasi di mana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka akan lebih mudah untuk memenuhi pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produksi yang besar, maka potensi permintaan konsumsi juga besar, karena penduduk usia produksi

biasanya mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya. Bonus demografi juga ditandai dengan tren penurunan angka kelahiran dan angka kematian, yang menyebabkan penurunan komposisi penduduk usia anak-anak dan peningkatan penduduk usia lanjut. Pada tahun 1970, populasi anak-anak mencapai 44,12 persen dari total populasi, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 24,56 persen, sementara pada tahun 1971 populasi usia produktif mencapai 53,39 persen dari total populasi, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 70 persen.

Saat jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif di suatu wilayah tinggi, maka dipastikan bahwa jumlah tenaga kerja serta angkatan kerja akan terus bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka jika peluang kerja, menurut Adam Smith dan David Ricardo (2016). menyatakan bahwa kenaikan angka pengangguran di suatu daerah dapat dipicu oleh bertambahnya jumlah populasi. Mereka berpendapat bahwa karena penduduk adalah sumber daya tenaga kerja, khususnya yang berada di usia produktif. Kenaikan jumlah penduduk dalam usia kerja tanpa diimbangi dengan penambahan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan Rubijanto (2012), jika populasi terus bertambah tanpa upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang cukup, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, termasuk isu pengangguran.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Usia Produktif Negara Indonesia 2019-2024 (jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Produktif
2019	183.363.254
2020	183.517.329
2021	190.981.325
2022	190.969.164
2023	190.983.461
2024	196.558.195

Sumber: BPS 2025

Namun jika dilihat pada gambar di atas bahwa dalam 6 tahun terakhir ini jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan dan juga pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 5.574.734 jiwa dari tahun sebelumnya, akan tetapi di tahun 2022 jumlah penduduk usia produktif mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12.161 jiwa dari tahun sebelumnya 2021.

Berdasarkan angka pengangguran Pendidikan tinggi di Indonesia yang masih terbilang cukup tinggi dilihat dari data yang dijabarkan oleh BPS dalam 4 tahun terakhir, terlihat bahwa Indonesia masih merupakan masih tinggi tingkat pengangguran, yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran pendidikan tinggi. Latar belakang adanya hubungan antara investasi, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk usia produktif menjadi pengaruh dalam pengurangan atau

meningkatkan pengangguran pendidikan tinggi di Indonesia maka dalam hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS PENGARUH INVESTASI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN TERDIDIK PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perkembangan Investasi, Rata-rata Lama Sekolah, Penduduk Usia Produktif dan Jumlah Pengangguran Pendidikan Tinggi pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2019-2024.?
2. Bagaimana Pengaruh Investasi, Rata-rata Lama Sekolah dan Penduduk Usia Produktif Terhadap Jumlah Pengangguran Pendidikan Tinggi pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2019-2024 secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan penelitian yang didapatkan yaitu:

1. Untuk mengetahui Perkembangan Investasi, Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Jumlah Pengangguran Terdidik pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2019-2024.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Investasi Rata-rata Lama Sekolah, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Jumlah Pengangguran Jumlah Pengangguran Terdidik pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya di Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami jumlah pengangguran jumlah Pendidikan tinggi Di Indonesia.
- b. Bagi pemerintahan, diharapkan adanya penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Pengangguran Jumlah Pendidikan Tinggi Di Indonesia.
- c. Bagi penulis, diharapkan adanya penelitian ini sebagai pengetahuan baru mengenai pengaruh Investasi, Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah Penduduk

Usia Produktif Terhadap Jumlah Pengangguran Pendidikan Tinggi Di Indonesia.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan baru serta memperluas wawasan khususnya dibidang ekonomi.